PROPOSAL

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunnan Daerah

PT. Lexion Indonesia

Jl. Bendul Merisi Selatan IV No 72 Surabaya
Phone. 031- 8431081. Mobile. 0811 340 7175
www.lexion.co.id - Email: alimin@lexion.co.id

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagai pengganti UU No 32 Tahun 2004 yang memiliki sejumlah kelemahan diantaranya kejelasan pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah daerah yang sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat dan tuntutan pelaksanaan desentralisasi, maka dalam UU No 23 Tahun 2014 hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diatur lebih luas dan adanya jaminan terselenggaranya pelayanan publik dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Prinsipnya adalah efisiensi, efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, dan menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan memiliki tujuan:

1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Untuk itu inovasi dalam perencanan perlu dilakukan, salah satunya adalah dengan menerapkan teknologi informasi dalam proses perencanaan.

Aplikasi SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) atau biasa juga disebut *E-Planning* adalah aplikasi yang menginovasi proses Musrenbang Kecamatan, Kabupaten/Kota, Forum SKPD, Musrenbang RKPD, RKPD hingga KUA-PPAS menjadi lebih transparan, cepat, terintegrasi, konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum dari Pedoman Pembuatan *Aplikasi SIPPD* ini adalah:

1. Undang-Undang No.23 Tahun 2014, tentang *"Pemerintah Daerah"*;
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004, tentang *"Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)"*;
3. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang *"Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang "Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah"*
4. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
6. Permendagri No 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
7. Permendagri No 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah dalam rangka Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) atau *E-Planning*

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Penyusunan Aplikasi SIPPD atau *E-Planning* antara lain:

1. Memudahkan dan mempercepat proses perencanaan, mulai dari Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang RKPD, RKPD, KUA-PPAS dan PRA RKA.
2. Mencetak dokumen hasil proses perencanaan sesuai dengan aturan

3. Menjaga konsistensi antara Dokumen Perencanaan RPJMD, RKPD, KUA-PPAS dan APBD serta RENJA SKPD
4. Mempermudah Tim Anggaran mengevaluasi Usulan Program dan Kegiatan
5. Mempermudah SKPD menyusun Renja SKPD dan Pra RKA

1.4. MANFAAT

Manfaat yang bisa diperoleh dengan mengimplementasikan Aplikasi SIPPD atau *E-Planning* antara lain:

1. Penyusunan RKPD, KUA-PPAS dan PraRKA lebih terstruktur, rapi, dan cepat.
2. Pengendalian, monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan SKPD sejak usulan hingga menjadi RKPD dan KUA-PPAS lebih cepat dan transparan.

1.5. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh SKPD yang terlibat dalam proses perencanaan. Aplikasi SIPPD atau *E-Planning* akan membantu terjadinya standarisasi format usulan dan pelaporan seluruh SKPD.

1.6. KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

1. Software Aplikasi SIPPD atau *E-Planning*
2. Buku Panduan Menjalankan Aplikasi SIPPD atau *E-Planning*
3. Pelatihan Menjalankan Aplikasi SIPPD atau *E-Planning*

1.7. LINGKUP KEGIATAN

Melakukan evaluasi implementasi pelaksanaan perencanaan selama ini, meliputi :

1) Menginventarisasi hasil perencanaan selama ini
2) Menginventarisasi format usulan program dan kegiatan pembangunan
3) Menyusun Aplikasi SIPPD atau *E-Planning*

2.1. DESAIN SISTEM APLIKASI SIPPD / E-PLANNING

Secara sederhana jalannya aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD / E-PLANNING) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar Alur Aplikasi SIPPD / E-PLANNING

1. Menu SIPPD / E-PLANNING SKPD

- Hasil Musrenbang Kecamatan akan disinkronkan dengan Renstra SKPD yang sudah disesuaikan dengan RPJMD dan Prioritas RKPD.
- Dewan lewat Pokok Pikiran Dewan memasukkan aspirasi masyarakat sejak tahap Musrenbang Kecamatan
- Hasil dari sinkronisasi Musrenbang Kecamatan dan Renstra SKPD akan menjadi Draft Renja sebagai bahan pembahasan di Forum SKPD.
- Forum SKPD akan menghasilkan Rancangan RKPD yang akan di bahas Tim Anggaran di Musrenbang RKPD dan Kepala Daerah untuk menjadi RKPD.
- Dari RKPD akan dihasilkan Renja SKPD dan Rancangan KUA-PPAS
- Pada KUA-PPAS, SKPD menyusun detail belanja SKPD seperti menyusun RKA

2. Laporan SIPPD / E-Planning

- RKPD
- Renja SKPD
- KUA-PPAS
- PraRKA SKPD

2.2. HIRARKI PENGGUNA APLIKASI

Adapun hirarki pengguna *Aplikasi SIPPD / E-PLANNING* terdiri atas:

1. Administrator Sistem

   Memiliki kewenangan dalam mengatur master data, mengunci proses, hak user dan mencetak laporan.

2. SKPD

   Memiliki kewenangan untuk memasukkan data usulan kegiatan SKPD dan menerima atau menolak hasil musrenbang kecamatan.

3. Musrenbang Kecamatan

   Memiliki kewenangan untuk memasukkan hasil Musrenbang Kecamatan.

4. Tim Anggaran

   Memiliki kewenangan untuk mengesahkan usulan SKPD menjadi RKPD dan KUA-PPAS.

5. Dewan

   Memiliki kewenangan untuk memasukkan Pokok-Pokok Pikiran Dewan

2.3. SPESIFIKASI TEKNIK PEMROGRAMAN

Spesifikasi teknik pemrograman Aplikasi SIPPD / *E-PLANNING* menggunakan spesifikasi *Open Source*, antara lain:

a. Bahasa Pemrograman menggunakan PHP

b. Menggunakan database MySQL

TAMPILAN APLIKASI

1. Gateway SIPPD / E-Planning

SIPPD atau *E-Planning* adalah sebuah aplikasi yang terdiri dari 2 (dua) modul utama tapi merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan saling terintegrasi, yaitu : E-Musrenbang dan E-RKPD.

- Gateway SIPPD Kota Makassar

- Gateway E-Planning Provinsi Riau

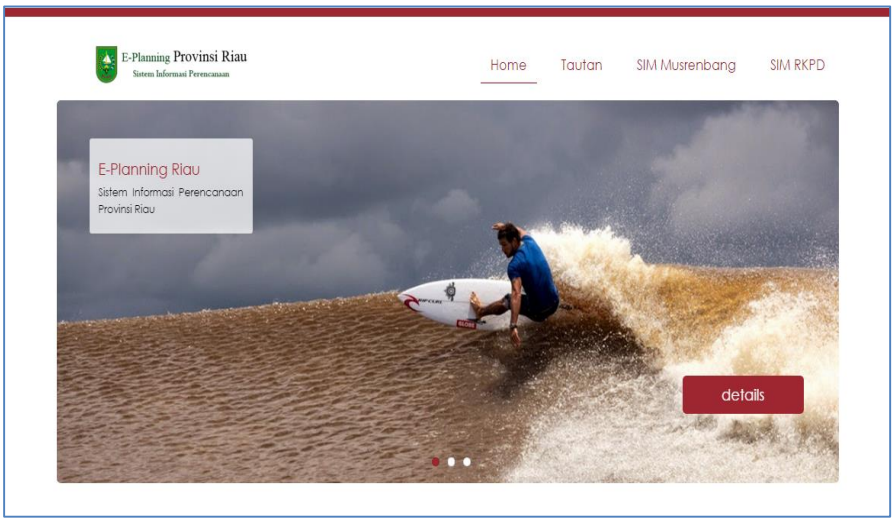

2. Menu Halaman Depan

Merupakan halaman utama ketika pertama kali user membuka aplikasi SIPPD / *E-PLANNING*, terdapat 2 pilihan login untuk masuk ke dalam aplikasi.

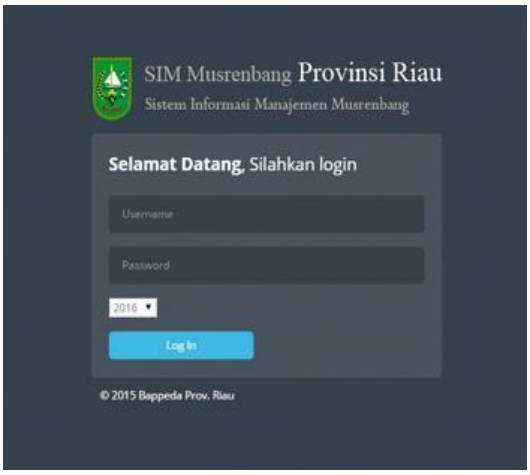

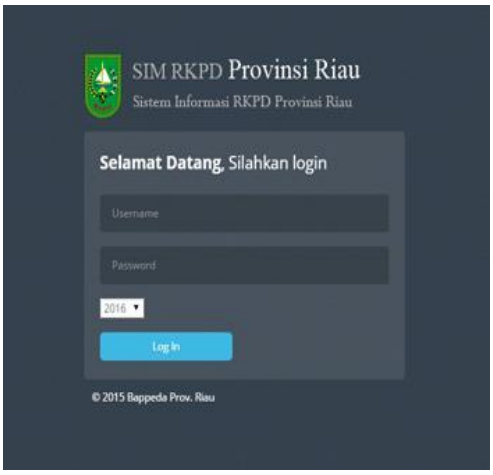

3. Tahapan Proses SIPPD / e-Planning

4. Menu RKPD

Menu untuk mengolah usulan Forum SKPD, Musrenbang hingga menjadi RKPD

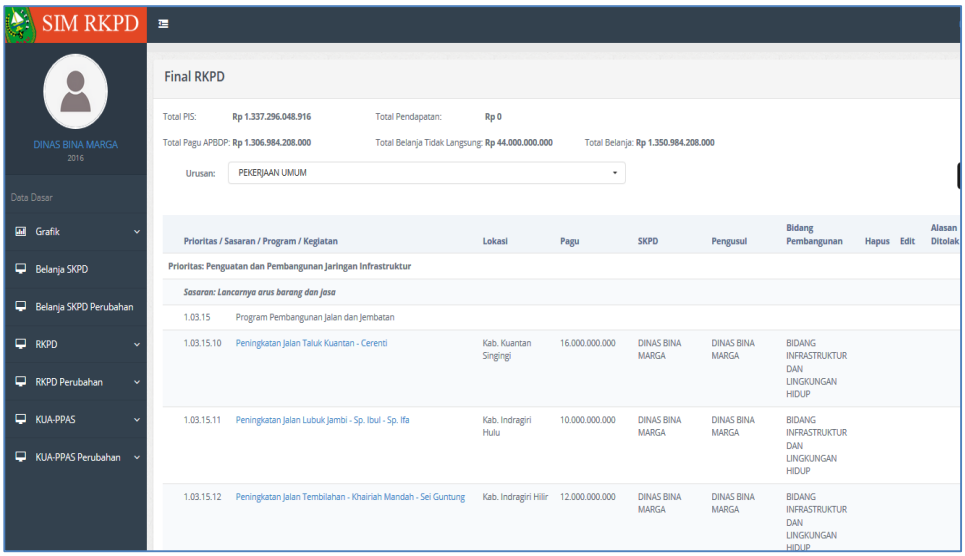

5. Menu RENJA dan KUA-PPAS

Berfungsi untuk proses RENJA dan KUA-PPAS

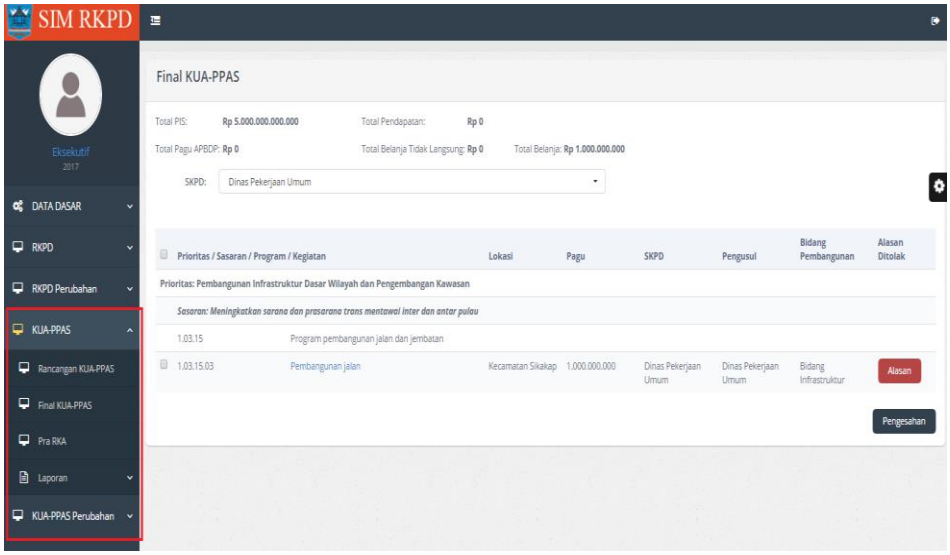

6. Menu Pra RKA

Berfungsi untuk menampilkan hasil pengisian detail belanja seperti RKA

7. Menu Laporan

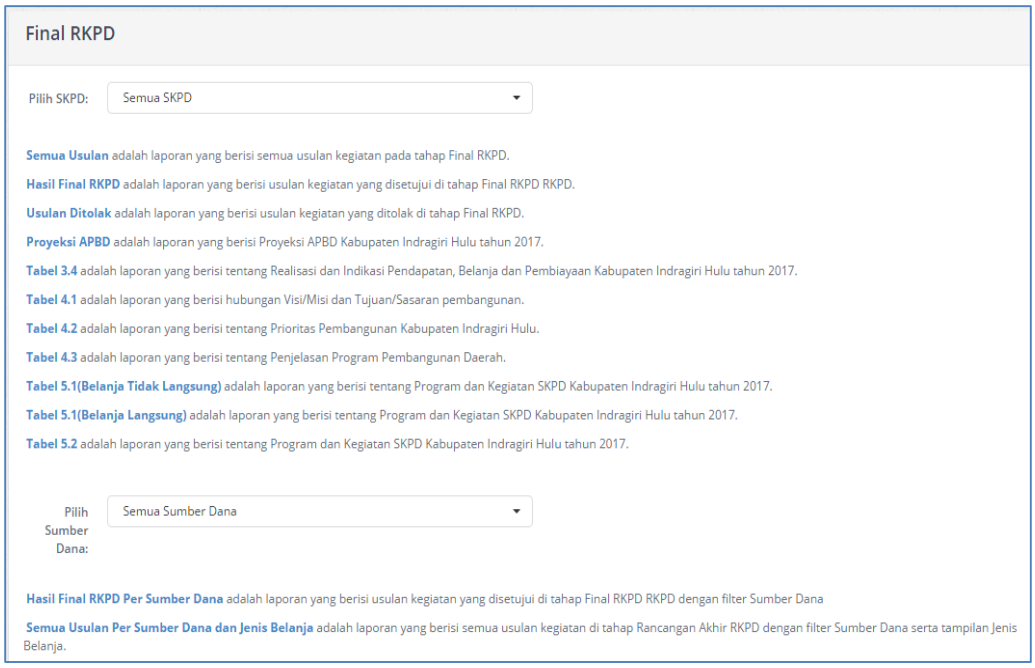

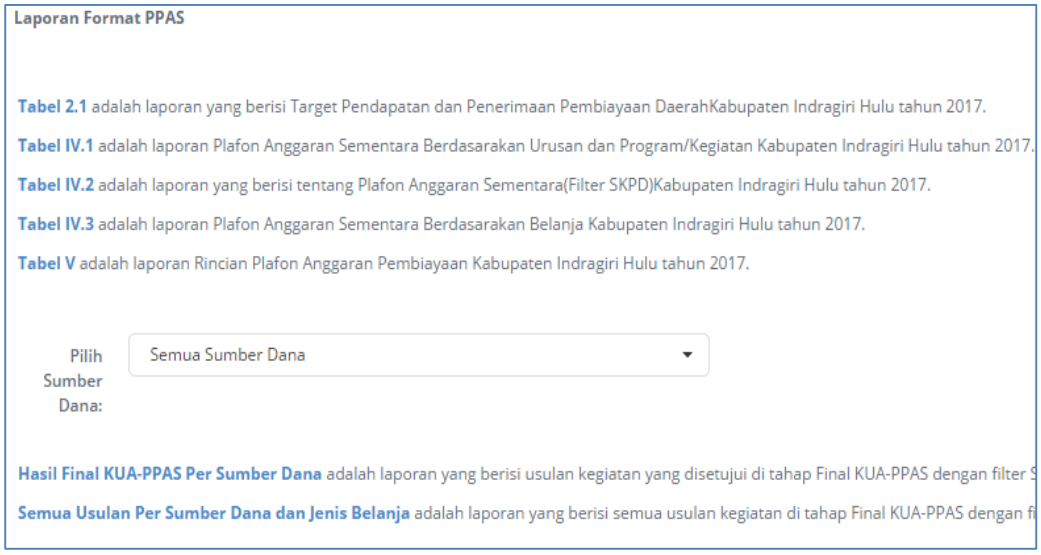

PENUTUP

" Semakin baik dokumen perencanaan yang dihasilkan, akan memudahkan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Kegiatan dan Mencapai Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan SKPD

Suatu kehormatan bila sistem ini dapat meningkatkan kinerja pembangunan pemerintah daerah. Dan kami merasa masih banyak yang harus kita diskusikan untuk lebih mematangkan konsep dan aplikasi ini.

Atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

PT. LEXION Indonesia

Direktur,

Moch. Alimin, ST. MBA
Hp. 0811 340 7175
Emai. alimin@lexion.co.id
Web. www.lexion.co.id

LEXION
Leading In Innovation

Leading in Innovation of Technology and Information